

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA BARU KECAMATAN BATU BENAWA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

ZULIAN SURYATNA PRASETYA

N P M : 2022392

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : ZULIAN SURYATNA PRASETYA

NPM : 2022392

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BARU KECAMATAN
BATU BENAWA KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH** setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya,
kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di
depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,

Arif Budiman, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 7950765666130302

Amuntai, 04 Februari 2026
Pembimbing II,

Akhmad Berkatillah, S.Sos, M.A.
NUPTK. 0537767668130363



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dengan bentuk sederhana. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti.

Tujuan pembuatan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”** Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos.,M.AP, CIQnR., CIQaR Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., MA Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
3. Bapak Arif Budiman, S.Sos., M.AP. pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Akhmad Berkatillah S.Sos., MA pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Bapak Syarifudin Kepala Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sudah memberikan izin penelitian.
6. Seluruh Aparat Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.

7. Seluruh Dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Amuntai.
8. Teman teman di STIA Amuntai yang turut membantu dan saling memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Amuntai, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	6
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Partisipasi	14
2. Partisipasi Masyarakat	17
3. Pembangunan	27
4. Pembangunan Desa	29
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Tipe Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Desain Operasional Variabel	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42

G. Teknik Analisa Data	43
H. Uji Kredibilitas Data	43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun infrastruktur. Dalam konteks pembangunan di tingkat desa, partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat turut terlibat secara aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan itu sendiri.

Pemerintah Indonesia telah sejak lama menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, termasuk dalam hal pembangunan. Dalam semangat desentralisasi ini, masyarakat desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek atau pelaku utama yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat langsung dalam menentukan arah dan bentuk pembangunan di wilayahnya.

Adanya berbagai tuntutan yang berkembang dari berbagai elemen dalam masyarakat dan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, menuntut pemerintah desa untuk selalu melaksanakan pembangunan agar terciptanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup warga di sebuah desa. Pembangunan tidak hanya terdapat di kota tetapi juga di desa. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan dan

pembaharuan yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan secara berencana dan bertahap.

Setiap kegiatan pembangunan sebaiknya bersifat *pareto superior* (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan *pareto optimal* (membangun mengorbankan orang lain). Prinsip ini muncul dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang disebut dengan prinsip *pareto* menjelaskan tentang tiga jenis kesejahteraan. Dalam tingkatan *pareto optimal* terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Dalam kondisi *pareto superior* terjadinya peningkatan kesejahteraan tidak akan mengurangi kesejahteraan seseorang atau kelompok lain.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya mencerminkan demokratisasi dalam pengelolaan pemerintahan lokal, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan terlibatnya masyarakat, pembangunan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Selain itu, partisipasi aktif juga dapat memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Desa Baru, yang terletak di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, merupakan salah satu desa yang menjadi perhatian dalam konteks pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Secara geografis, Desa Baru memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup mendukung untuk pengembangan wilayah. Namun, seperti halnya desa-desa lain di Indonesia, Desa Baru juga menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan, baik dari segi keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur desa, hingga tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Baru, terdapat berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana-dana ini seharusnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang dirancang bersama masyarakat melalui musyawarah desa.

Partisipasi masyarakat sendiri memiliki dimensi yang luas, mulai dari partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Bentuk partisipasi tersebut juga dapat bersifat fisik (seperti gotong royong), finansial (seperti sumbangan), maupun non-fisik (seperti memberikan ide, menghadiri rapat, atau terlibat dalam pengawasan). Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana bentuk partisipasi masyarakat di Desa Baru, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut, serta sejauh mana partisipasi itu berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Permasalahan yang ada pada Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah:

1. Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keterlibatan dalam musyawarah desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Namun, di Desa Baru masih ditemukan fenomena rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan musyawarah ini. Sebagian besar warga kurang tertarik untuk hadir atau merasa tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan yang diambil. Kondisi ini menyebabkan pembangunan yang direncanakan kurang merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat. Desa Baru masih ada masyarakat yang belum ikut berpartisipasi, dapat dilihat dari data keikutsertaan masyarakat dalam acara musrenbang pada tahun 2024-2025, yang mana undangan yang dibagikan sebanyak 50 undangan yang berpartisipasi hanya 20 orang atau 40% dari undangan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diadakan di Desa masih tergolong belum

maksimal, mulai dari aspek semangat maupun kesadaran. Lemahnya semangat dan kesadaran masyarakat. (Sumber : Absen Musrenbang, 2024-2025)

2. Partisipasi masyarakat yang belum menyeluruh pada semua tahapan pembangunan. partisipasi masyarakat yang hanya dominan pada tahap pelaksanaan fisik, seperti kegiatan gotong royong atau pembangunan infrastruktur. Namun, masyarakat masih kurang terlibat dalam tahapan pengawasan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Daftar kehadiran gotong-royong masyarakat Desa Baru. Bahwa dari 50 orang yang diundang untuk ikut bergotong royong, rata-rata hanya 15 sampai dengan 20 orang saja yang hadir atau hanya sekitar 30% sampai 40% saja yang hadir. (Sumber : Desa Baru, 2025)
3. Kurangnya keterlibatan kelompok tertentu dalam proses pembangunan. masih terbatasnya partisipasi dari kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat kurang mampu. Mereka cenderung tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik karena faktor budaya, kurangnya kepercayaan diri, maupun tidak adanya ruang yang memadai bagi mereka untuk menyampaikan pendapat.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai

Tengah. Maka peneliti memfokuskan menurut Menurut Yadav dalam Theresia (2016:198) Partisipasi Masyarakat yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Desa Baru Kecamatan Benawa Kecamatan Hulu Sungai Tengah dalam rangka Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Kamaliah, 2023. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan di Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dengan melibatkan 17 informan. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang baik dilihat dari tiga indikator cukup baik dan 6 indikator kurang baik, Faktor pendorong yaitu Fasilitas pembangunan digunakan masyarakat dengan baik dan Masyarakat memberikan ide atau gagasan dan faktor penghambat yaitu Pengetahuan masyarakat dan Pekerjaan masyarakat.
2. Prayogi Pangestu, 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, hal ini ditekankan mengingat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu masih jauh dari kata maksimal, serta untuk mengetahui model partisipasi masyarakat

dalam pembangunan Desa Tanjung Batu. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu berjalan dengan baik sesuai dengan 4 indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu. Partisipasi masyarakat melalui indikator assesment masyarakat terlibat dalam memberikan nilai-nilai dalam pembangunan atau mengedintifikasi masalah-masalah yang ada, serta terlibat dalam tahap perencanaan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai potensi masyarakat. Indikator alternatif program masyarakat terlibat memberikan usulan untuk alternatif program kebijakan pembangunan apabila pembangunan mendapatkan masalah. Indikator pelaksanaan masyarakat terlibat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan, masyarakat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Indikator Evaluasi masyarakat terlibat memberikan nilai-nilai terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, melalui input, proses, dan output masyarakat dapat memberikan usulannya. Sementara model partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu dikatakan campuran, partisipasi masyarakat Desa Tanjung Batu ada yang secara langsung terlibat dalam pembangunan desa misalnya ada yang menyumbang uang atau alat, tenaga serta keterampilan mereka. Selain itu ada juga masyarakat yang terlibat secara tidak langsung misalnya menyumbang ide-ide pemikiran, pendapat dan pengambilan keputusan.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis partisipasi masyarakat yang tidak hanya dilihat secara umum, tetapi dikaji secara mendalam berdasarkan tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menekankan partisipasi substantif masyarakat, seperti kontribusi ide, tenaga, dan pengawasan sosial, bukan sekadar kehadiran

dalam musyawarah. Selain itu, penelitian ini mengangkat perspektif langsung masyarakat untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat partisipasi dalam konteks sosial dan budaya lokal, sehingga menghasilkan temuan empiris yang kontekstual serta rekomendasi praktis bagi penguatan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2019: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian *“a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them”* Deepa Naryan (2016:12), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau

mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2019: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2021: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R Tilaar (2019: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2017: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen dalam Isbandi (2017: 27) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (2019:154-155) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa

memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

2. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian

Partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan dimana masyarakat tentunya harus melibatkan emosi dan mental dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka. Lukmanul Hakim, (2016:50) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang apa yang dimaksud dengan kata partisipasi. Dengan mengutip ungkapan-ungkapan dari Kamus Oxford, mulai membahas partisipasi dalam "tindakan atau fakta mengambil bagian dalam, memiliki atau membentuk bagian dari". Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif, bermoral atau tidak bermoral.

Sari P (2021:95) yang menjabarkan bahwa pokok partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat harus efektif dan berhasil, dan tidak dapat mengatur kepentingan pribadi beberapa kelompok karena dengan lebih. Agar secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kebijakan yang akan diambil harus dilibatkan, motivasi penting di balik kontribusi desa adalah untuk masukan dan saran yang bermanfaat bagi penduduk dan jaringan yang tertarik (kepentingan umum) agar pengambilan keputusan berkualitas, karena dengan mempengaruhi individu yang mungkin terpengaruh oleh pendekatan dan kebijakan pihak yang berkepentingan, pilihan dinamis dibuat. Persyaratan dan asumsi untuk jaringan dan pertemuan ini dapat ditangkap dan kemudian digabungkan menjadi sebuah ide. Pada sisi lain, opini dan tanggapan masyarakat akan membantu pengambilan pilihan (mitra) untuk mengidentifikasi prioritas dan kepentingan, dan peran masyarakat juga merupakan etika politik yang memandang masyarakat sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan.

Winardil (2019:79) yang mengemukakan “partisipasi merupakan turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut”. Selain itu menurut peneliti “partisipasi merupakan keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”.

Beberapa unsur penting yang terdapat dalam partisipasi, yaitu: partisipasi berarti partisipasi mental dan emosional, bukan partisipasi

fisik, yang akan membangkitkan kesadaran sehingga dapat meningkatkan partisipasi, kemudian partisipasi mengajak orang lain untuk ikut andil dalam mendukung kehidupannya, nantinya menjadi bagian dari masyarakat akan berdampak pada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama, berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atas kebaikan bersama. Karena apa yang diberikan dilakukan dengan sukarela, ia membawa penyertaan penghargaan diri ke dalam organisasi.

Menurut Yadav dalam Theresia (2016:198) Partisipasi Masyarakat ada 4 variabel yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses merumuskan kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, dan memilih program yang akan dijalankan. Bentuk partisipasi ini mencerminkan demokrasi dan transparansi, di mana suara dan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan Kegiatan
Ini merujuk pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam melaksanakan program atau proyek pembangunan yang telah disepakati. Partisipasi ini bisa berupa tenaga, waktu, dana, atau bentuk kontribusi lainnya.
- 3) Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan
Partisipasi ini berarti masyarakat turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan rencana, anggaran, dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan, dampak, dan efisiensi pembangunan.
- 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
Partisipasi ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam menggunakan, merawat, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan agar memberikan manfaat berkelanjutan. Ini menandakan keberhasilan pembangunan karena hasilnya benar-benar digunakan oleh masyarakat.

Josef Riwu (2017:127) berpendapat partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitupertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

- 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Siti Fatimah (2018:21) tipologi partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Partisipasi pasif/manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- 2) Partisipasi informatif memiliki karakteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi

kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

- 3) Partisipasi konsultatif dengan karakteristik masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi, tidak ada peluang membuat keputusan bersama, dan profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan (sebagai masukan) atau tindak lanjut.
- 4) Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korban atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
- 5) Partisipasi fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
- 6) Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
- 7) *Self mobilization* (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas untuk mengubah sistem dan nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Sedangkan Effendi (Sari, 2016: 60) membagi partisipasi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Partisipasi vertikal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.
- 2) Partisipasi Horizontal, dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa sendiri dimana setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda pemulaan timbulnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat juga dijelaskan oleh Huraerah (Septiyasa, 2018: 6) yaitu:

- 1) Partisipasi buah pikiran.
- 2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- 3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
- 4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran.
- 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Marhum (2021:141) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah: Pertama, pendidikan, kapasitas untuk membaca dan menulis, kebutuhan, posisi, posisi sosial, dan tidak adanya keberanian. Kedua, adalah faktor dalam pemahaman yang dangkal tentang negara. Ketiga, kecenderungan untuk salah mengartikan inspirasi, tujuan dan kepentingan asosiasi rakyat yang biasanya mendorong munculnya pandangan yang salah tentang

keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk (pemerintah yang memiliki wewenang) dan kekurangan posisi terbuka untuk mengambil bagian dalam program perbaikan yang berbeda. Selain itu partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor internal lain. Faktor -faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- 1) Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
- 2) Jenis Kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
- 3) Pendidikan Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

- 4) Pekerjaan dan Penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
- 5) Lamanya Tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Pamuji (2017:497) mengatakan bahwa sifat dan ciri-ciri partisipasi merupakan kepentingan yang harus disengaja, isu-isu berbeda harus diperkenalkan dan diperiksa dengan jelas dan tidak memihak, kesempatan untuk mengambil bagian harus mendapatkan data yang jelasl dan memuaskan tentangl setiap perspektif/bagian dari program yangl akan dibicarakan dan dukungan daerah setempat untuk memutuskan keyakinan diri itu sendiri harus mencakup tingkat yang berbeda dan bidang yang berbeda, bersifat dewasa, signifikan, dan ekonomis serta terkait erat dengan kemajuan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses memajukan desa, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan

pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, ditentukan tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya unsur kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, pada umumnya berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga variasi bentuk partisipasi masyarakat, yaitu:

- 1) Partisipasi terbatas, partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan,
- 2) Partisipasi penuh, partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan dan
- 3) Mobilisasi tanpa partisipasi, partisipasi yang dibangkitkan pemerintah,

c. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* (dalam Monique Sumampouw, 2016: 106-107) adalah:

- 1) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- 4) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- 5) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- 6) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

- 7) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

3. Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2019:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rochajat (2019:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Selanjutnya menurut Rostow dalam Abdul (2019:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Rochajat (2019:3) Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. Subandi (2019:13) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

- 1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*),

- 2) Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan
- 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

4. Pembangunan Desa

a. Pengertian

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan

mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;

- 2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- 3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - c) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

b. Pembangunan Infrastruktur Desa (Fisik)

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian (2019:34) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (*service*). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

- 1) Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.
- 2) Lebih statis dan permanen ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.

- 3) Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (device) fisik.
- 4) Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
- 5) Terpisah (distinct) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Sedangkan menurut Kuncoro (2020:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

c. Pembangunan Insfrastruktur Desa (Non Fisik)

Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembanguan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial.

Bachtiar Effendi (2020:114) oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu:

- 1) Pembangunan manusia
- 2) Ekonomi
- 3) Pendidikan.

Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun pembangunan antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik mengedepankan sumberdaya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik.

Usaha dibidang pembangunan non fisik dapat dijalankan dengan cara membimbing atau guiding, cara persuasi melalui telinga dan mata (audio visual), dan dapat dengan cara memberi stimulasi. Ketiga cara tersebut dilakukan agar masyarakat dapat tergugah untuk menimbulkan daya gerak serta dapat memberikan contoh konkrit pembangunan yang sebenarnya, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Kondisi non fisik terdiri dari atas aspek-aspek sosial budaya politik, dan religi. Aspek sosial budaya dalam arti sempit merupakan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang masih ditaati. Misalnya kegiatan gotong royong, yang merupakan

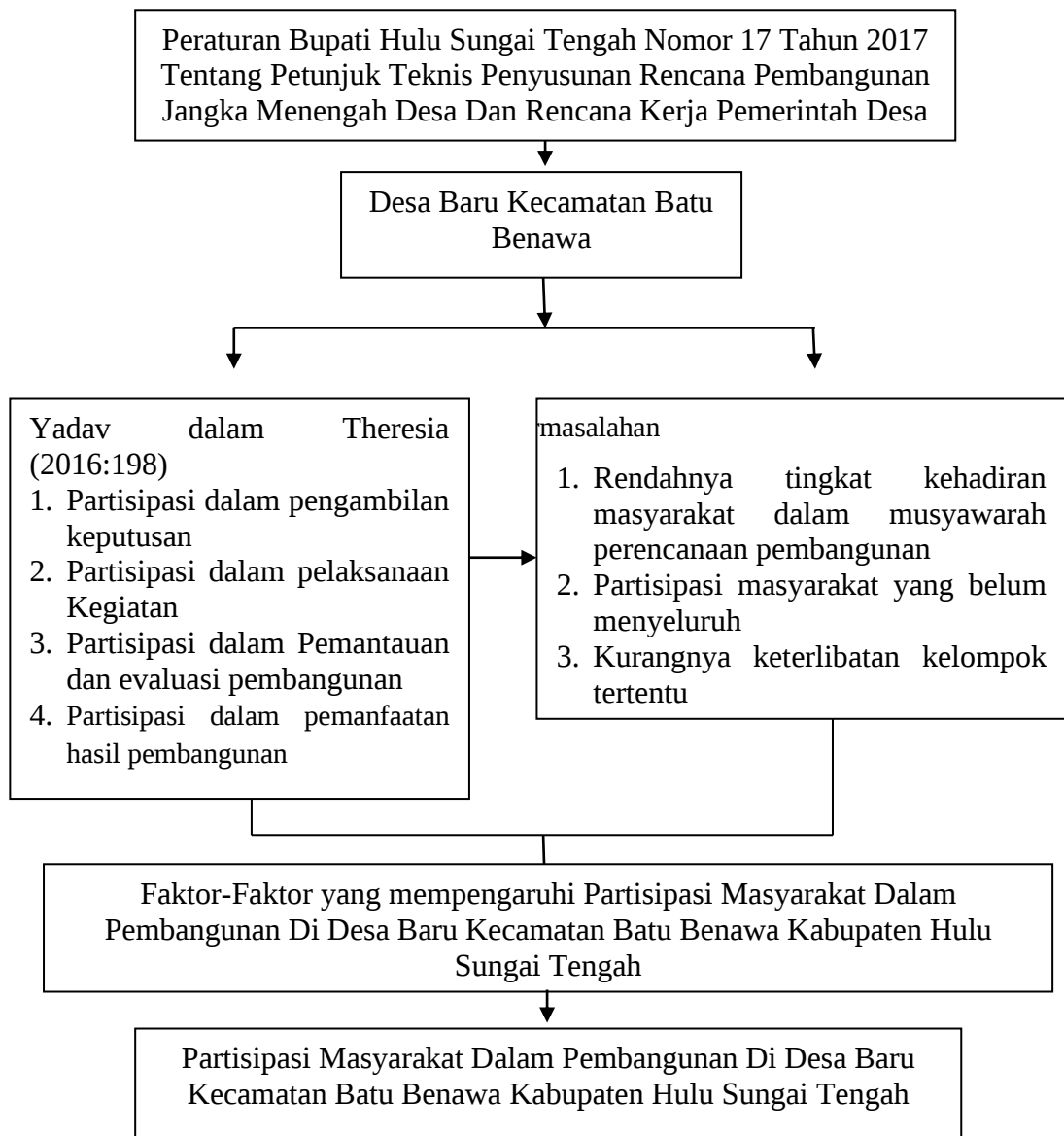
kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling berpengertian.

D. Kerangka Pemikiran

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah peneliti memfokuskan pada teori Yadav dalam Theresia (2016:198) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan Kegiatan, Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan dan Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Adapun kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Baru Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian penjelasan yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel penelitian dan hipotesis yang harus di buktikan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Sugiyono (2016:25) dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2016:4) Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ialah metode menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2016:245) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

- a. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai dan beberapa orang masyarakat Desa.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber Data menurut Sugiyono (2016:225) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut informan, orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik observasi maka sumber data disbut informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi data. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian, terutama kualitatif, di mana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan spesifik peneliti untuk tujuan penelitian tersebut, dan bukan secara acak. Peneliti memilih individu, kasus, atau unit yang dianggap memiliki

informasi atau karakteristik yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari beberapa 15 orang dengan rincian pada tabel 3.1 sbagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan

	Nama	Jabatan
1	Syarifudin	Kepala Desa
2	Norhidayah	Sekretaris Desa
3	Baitul Rahman	Kaur Keuangan
4	Abdul Hadi	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Mila Hidayani	Staf
6	Nanda Ellysa	Staf
7	M. Nasrullah	Ketua BPD
8	Riyandi	Wakil Ketua BPD
9	Samsul	Ketua RT I
10	Syamsul Hadi	Ketua RT III
11	Abdul Hadi	Masyarakat
12	Sarbani	Masyarakat
13	Mulkani	Masyarakat
14	Saukan	Masyarakat
15	Ahmad Badali	Masyarakat
Total		15 Orang

Sumber : Dibuat Peneliti, 2026

E. Definisi Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2016:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional yang mengacu pada teori Yadav dalam Theresia (2016:198) Partisipasi Masyarakat ada 4 variabel yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses merumuskan kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, dan memilih program yang akan dijalankan. Bentuk partisipasi ini mencerminkan demokrasi dan transparansi, di mana suara dan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan Kegiatan

Ini merujuk pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam melaksanakan program atau proyek pembangunan yang telah disepakati. Partisipasi ini bisa berupa tenaga, waktu, dana, atau bentuk kontribusi lainnya.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan

Partisipasi ini berarti masyarakat turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan rencana, anggaran, dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan, dampak, dan efisiensi pembangunan.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam menggunakan, merawat, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan agar memberikan manfaat berkelanjutan. Ini menandakan keberhasilan pembangunan karena hasilnya benar-benar digunakan oleh masyarakat.

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Partisipasi dalam Theresia (2016:198) Partisipasi Masyarakat	1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan	a. Menyumbangkan gagasan atau pemikiran b. Partisipasi masyarakat dalam kehadiran c. Memberikan tanggapan penolakan
	2. Partisipasi dalam pelaksanaan Kegiatan	a. Memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, uang dan pikiran b. Partisipasi dalam pemeliharaan pembangunan
	3. Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan	a. Pemantauan atau pengawasan terhadap hasil dari pembangunan b. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan
	4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan	a. Menjaga dan merawat hasil pembangunan b. Mempergunakan hasil pembangunan

Sumber : Dibuat oleh peneliti, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:217) sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)
Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana, (2018:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2018:14).
2. Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi.
3. Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan.

H. Uji Kredibilitas Data

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono dalam Patimah (2017:45) salah satu

nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan

3. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa besar jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian terutama penelitian kualitatif dengan cara membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber, metode, teori, atau peneliti agar hasil penelitian lebih akurat, valid, dan dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- Anonim. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Deepa Naryan. 2016. *The Contribution of People's Partisipation* : evidence from rural water supply projects. Environmentally
- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi. 2021. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks. Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- H.A.R Tilaar. 2019. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan. Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika
- Kamaliah, 2023. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
- Isbandi. 2017. Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI Press
- Lukmanul Hakim, 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Sukamerta Kabupaten Karawang.*” Jurnal Politikom
- Sari P. 2021. Pengaruh Kecanggihan Teknologi. Informasi, Partisipasi Manajemen, Pengetahuan Manajer, Pelatihan.
- Winardil 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Nadi Pustaka
- Josef Riwu. 2017. *Prospek Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawongsangula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149.
- Pamuji, K. D., Aziz, N. A., & Riswari, R. A. 2017. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1), 493-570
- Sumampouw, Monique. 2004. Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif. Jacob Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Prayogi Pangestu, 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
- Miles, Huberman dan Saldana, 2017. *Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook*. Publications
- Siagian, Sondang P. 2019. *Administrasi Pembangunan*, Gedung Agung, Jakarta
- Siti, Irene, 2019. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyrakat. Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta Bandung.
- Sjafrizal. 2016. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada
- Theresia, A.E. al. dr. 2016. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: PT. ALFABETA
- Tjiptono Fandy. 2018. *Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta.
- Tim Penyusun, 2025. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.